



Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dalam Peningkatan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

Tri Mukti Wijayanti¹, Mohammad Sofyan², Hartirini Warnaningtyas³

¹⁻³Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

Email: trimukti2307@gmail.com¹, msofyan@unmer-madiun.ac.id², hartirini@unmer-madiun.ac.id³

*Penulis Korespondensi: trimukti2307@gmail.com

Abstract. This research aims to analyze the process of administration and preparation of the financial reports Treasurer's Accountability Report (LPJ) on the performance at the Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, and to evaluate its compliance with applicable regulations. The research method uses descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants consist of Budget Users (PA), Financial Management Officers-SKPD (PPK-SKPD), Technical Management Officers of Activities (PPTK), and Academics. The results indicate that the process of administration and preparation of the LPJ has been carried out well and orderly in accordance with Permendagri No. 77 of 2020 and Perbup Madiun No. 142 of 2023. There is an increase in the realization of the spending budget by 2% in 2025 compared to 2024. Realization in 2024 was 93.40% and in 2025 was 95.40% which shows the organization's performance from a financial aspect. The main obstacles faced are technical factors in the form of internet network instability in the regional government information system (Sistem Informasi Pemerintah Daerah-SIPD) and errors in inputting account codes at the planning stage which hamper the realization of expenditures so that they do not comply with the plan. Researchers suggest the need to improve network infrastructure, strengthen planning coordination through an internal control system, and develop human resource capacity periodically to optimize reporting accountability and performance at the Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Keywords: Budget Realization; Financial Reporting; LPJ; Public Sector Performance; Regional Government.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti cara pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, serta untuk menilai kesesuaian dengan peraturan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber penelitian meliputi Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan – SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Akademisi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyusunan LPJ telah dilakukan dengan baik serta teratur sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Perbup No. 142 Tahun 2023. Ada peningkatan realisasi anggaran belanja sebanyak 2% di tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi di tahun 2024 sebesar 93,40% dan tahun 2025 sebesar 95,40% yang menunjukkan kinerja organisasi dari aspek keuangan. Kendala utama yang dihadapi adalah faktor teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet pada aplikasi keuangan (SIPD) serta kesalahan input kode rekening pada tahap perencanaan yang menghambat realisasi belanja sehingga tidak sesuai dengan perencanaan. Peneliti menyarankan perlunya peningkatan infrastruktur jaringan, penguatan koordinasi perencanaan melalui sistem pengendalian internal, serta pengembangan kapasitas SDM secara berkala guna mengoptimalkan akuntabilitas pelaporan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Kata kunci : Akuntabilitas Pelaporan; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; Kinerja Organisasi; Laporan Pertanggungjawaban; Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan finansial daerah adalah suatu elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintah yang efektif. Salah satu komponen dalam pengelolaan finansial ini adalah pencatatan dan pembuatan laporan akuntabilitas oleh bendahara. Bendahara memiliki posisi kunci dalam mengelola dan memberikan laporan atas setiap transaksi uang yang dilakukan

instansi pemerintahan termasuk di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Peranan bendahara pengeluaran sangat penting dalam menjamin bahwa laporan pertanggungjawaban disusun dengan tepat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi untuk pemerintahan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung, kurang efektifnya koordinasi anantara unit-unit kerja, masalah teknis pada aplikasi yang disebabkan oleh koneksi internet yang tidak stabil, serta keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perbendaharaan (Pamenta, et al. 2025). Di sisi lain diharapkan bendahara, pengeluaran dapat melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku mulai dari tahap pencatatan pengeluaran hingga deskripsi prosedur lengkap untuk penyampaian pertanggungjawaban (Dona, et al., 2021).

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun berfungsi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madiun yang memiliki posisi penting dalam bidang pangan dan pertanian demi mendukung ketahanan pangan serta sector peternakan di daerah tersebut. Instansi ini bertanggung jawab untuk mengatur anggaran yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prosedur pencatatan dan penyusunan laporan tanggung jawab bendahara di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pentingnya posisi bendahara dalam memastikan keteraturan pengelolaan keuangan sangat krusial, dan dengan adanya tantangan tersebut, diperlukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pelaporan yang ada, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dalam Meningkatkan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun”.

2. KAJIAN TEORITIS

Peneliti mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Kajian terhadap penelitian sebelumnya menjadi langkah krusial untuk memetakan sejauh mana topik ini telah dieksplorasi, mengidentifikasi celah penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis dan metodologis.

Dengan menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti bisa menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan dalam hasil yang ada, serta mengevaluasi seberapa jauh isu yang diangkat telah diteliti oleh orang lain. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap studi-studi terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai acuan, tetapi juga sebagai fondasi untuk menentukan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya, yang diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang yang relevan. Penelitian yang lampau juga menyediakan landasan yang kokoh mengenai prinsip akuntabilitas, namun tantangan dalam pengelolaan keuangan terus berkembang mengikuti perubahan regulasi dan teknologi. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa secara umum instansi pemerintah telah berupaya menjalankan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, patuh terhadap regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi dasar utama dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik.

Namun, hasil penelitian lainnya ini juga mengungkap beberapa masalah yang sering terulang di lapangan. Pertama, faktor sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, di mana kurangnya kompetensi dan *hard skill* bendahara sering menyebabkan kesalahan manual serta keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan. Kedua, adanya perubahan sistem dan aturan yang baru seringkali tidak dibarengi dengan sosialisasi yang cukup, sehingga pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Ketiga, masih ditemukan celah dalam pengawasan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.

Dalam konteks ini, para peneliti menitikberatkan perhatian pada cara sistem pengelolaan keuangan dioperasikan dengan cara yang lebih praktis dan efisien dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang ada, sehingga dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Secara keseluruhan, diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan manajemen keuangan yang transparan dan memiliki tanggung jawab yang baik.

Dalam karya yang ditulis oleh Terry et al. (2019) manajemen diartikan sebagai suatu sistem atau mekanisme yang mencakup pengarahan tim menuju sasaran organisasi melalui beberapa aktivitas, termasuk perencanaan, pengorganisasian, penentuan personel, pemberian motivasi, dan pengawasan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Sulastri (2012) menyatakan bahwa manajemen adalah kemampuan mengatur yang melibatkan langkah, metode, dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang diterapkan untuk menetapkan dan meraih tujuan dengan cara efektif dan efisien dan melibatkan orang lain. Fungsi kontrol dan pengawasan menjadi elemen kunci dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.

Manajemen Keuangan

Menurut Anwar (2019:5), pengelolaan keuangan adalah sebuah bidang studi yang meneliti bagaimana mengatur keuangan perusahaan, baik dalam hal mencari sumber dana, mendistribusikan dana, maupun cara membagikan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berdasarkan Wahyu, et.al (2023:9), pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek dari ilmu manajemen secara keseluruhan yang focus pada cara-cara mengatur keuangan.

Proses manajemen ini dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian melalui bantuan orang lain selama organisasi berjalan. Fungsi strategisnya mencakup perencanaan keuangan untuk menjaga kesehatan organisasi serta manajemen risiko guna menjaga stabilitas likuiditas dan operasional (Tampubolon et al., 2024).

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Di zaman digital ini, pengelolaan keuangan tidak bisa dipisahkan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM). Rojabi (2016:11) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, serta menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggabungkan manusia, teknologi, data, dan prosedur untuk mencapai tujuan manajerial. Wijoyo (2021:20) menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen terdiri dari serangkaian sub sistem yang lengkap dan terkoordinasi dan secara logis terintegrasi dan mampu mengubah data sehingga menjadi informasi melalui berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan karakter manajer berdasarkan kriteria mutu yang telah ditentukan.

Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penatausahaan keuangan

Menurut Kusmayadi (2012) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Penatausahaan keuangan daerah meliputi pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, dan penyimpanan berbagai dokumen yang dibutuhkan secara teratur, sistematis, dan berurutan, sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Keuangan yang tepat waktu, adanya ketepatan dalam pembukuan, tersedianya data, serta penyimpanan dokumen yang teratur, sehingga ketika diperlukan, membuatnya mudah untuk dibuka, karena adanya kesesuaian waktunya, keakuratan dalam pencatatan keuangan, ketersediaan data, dan penyimpanan dokumen yang teratur, sehingga ketika dibutuhkan, data tersebut mudah ditemukan dan diakses.

Hermelinda (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam seluruh proses keuangan daerah.

Saat ini, Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan wujud implementasi *e-government* dalam penatausahaan keuangan daerah. SIPD menuntut adanya integrasi data yang akurat guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas individu yang mengoperasikannya. Ketidakmampuan SDM dalam beradaptasi dengan fitur-fitur SIPD dapat mengganggu proses birokrasi keuangan sehingga berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, SIPD adalah sistem yang menggabungkan data dan informasi pemerintahan daerah ke dalam satu platform digital. Sistem ini dibuat untuk mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah yang lebih transparan dan terintegrasi secara nasional.

Laporan Keuangan

Menurut Thian (2022:1), laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi orang yang menggunakan laporan ini untuk membuat keputusan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan ini bisa membantu memperkirakan kejadian di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan dari Pemerintah Daerah adalah proses Menyusun dan menampilkan laporan keuangan oleh entitas yang melaporkan. Ini merupakan hasil gabungan dari lapoean keuangan SKPD yang bertindak sebagai entitas akuntansi.

Bendahara

Afriansyah (2019) dalam artikelnya menjelaskan bahwa bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, atau membayarkan uang negara, serta

merapikannya dan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anggaran dan belanja negara di kantor atau unit kerja kementerian atau lembaga.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004. Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, Bendahara Pengeluaran memiliki sejumlah tugas dan hak, antara lain mengajukan permintaan pembayaran, menerima dan menyimpan uang yang disebut UP, GU, dan TU; melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang sudah dikelolanya; menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) jika tidak mengikuti aturan yang ada; memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran; membuat laporan tanggung jawab administrasi kepada PA dan laporan tanggung jawab fungsional kepada BUD secara berkala; dan memungut serta menyetorkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kinerja Organisasi

Konsep kinerja organisasi menunjukkan bahwa setiap organisasi publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kita bisa menilai seberapa baik kinerja organisasi tersebut dengan menggunakan berbagai indikator. Ini membantu kita mengetahui apakah organisasi telah melakukan tugasnya dengan baik dan apakah tujuan mereka sudah tercapai.

Ada banyak cara untuk mengukur kinerja organisasi. Salah satunya bisa dari seberapa efektif, efisien, atau produktif organisasi tersebut. Selain itu, ada juga pendekatan yang lebih lengkap disebut Balance Scorecard, di mana kinerja dilihat dari empat sudut pandang yaitu aspek keuangan, proses di dalam organisasi, pertumbuhan, dan pembelajaran. Dengan hasil pengukuran kinerja ini, kita bisa melihat apakah organisasi itu bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat (Listiani, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai di sini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami pengalaman, pandangan, atau arti yang diberikan orang-orang terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu (Hasan et al., 2025:3).

Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelami lebih dalam pengalaman dan pandangan para pejabat yang mengurus keuangan saat Menyusun laporan keuangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Untuk penelitian kualitatif, jumlah informan bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan. Di beberapa situasi, kadang hanya diperlukan satu orang informan. Peneliti bisa menambahkan, mengurangi, atau bahkan mengganti informan selama proses penelitian berlangsung, tergantung pada kebutuhan informasi yang dirasa cukup dan cocok (Heryana, 2018). Dalam penelitian ini, terdapat tujuh informan yang terdiri dari enam pejabat yang mengurus keuangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Mereka termasuk Pengguna Anggaran (PA), PPK-SKPD, dan empat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari berbagai bidang, serta satu akademisi dari Universitas Merdeka Madiun.

Definisi Operasional

Peneliti merinci tiga aspek utama sebagai indikator pengukuran yang digunakan sebagai dasar atau pedoman wawancara kepada informan, yaitu :

Nomor	Aspek	Indikator SOP
1	Penatausahaan Keuangan	meliputi pencatatan transaksi, penggunaan SIPD, ketepatan administrasi, dan verifikasi dokumen.
2	Laporan Pertanggungjawaban	meliputi kesesuaian regulasi (Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 dan Permendagri 77/2020), ketepatan waktu, akurasi data, jenis pelaporan (Administratif dan Fungsional), dan kewajiban pelaporan perpajakan.
3	Kinerja Organisasi	meliputi capaian target anggaran, kompetensi SDM (Hard dan Soft Skill), efektivitas pengawasan internal, dan efisiensi kerja.

Data yang didapat dari penelitian ini berasal dari sumber primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan pengamatan dengan pejabat yang menangani keuangan. Selain itu, ada juga data sekunder yang didapat dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan peraturan yang berlaku.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pedoman wawancara yang berdasarkan definisi operasional, daftar periksa dokumentasi, lembar observasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan langsung terhadap proses kerja dan administrasi,, wawancara mendalam dengan informan yang relevan, serta dokumentasi berdasarkan catatan kejadian, peraturan, dan dokumen keuangan.

Analisis dari hasil penelitian dilakukan terus-menerus mulai sebelum hingga setelah melakukan survei di lapangan. Ini mencakup pengurangan data untuk menyederhanakan dan lebih memfokuskan hasil temuan, penyajian data untuk mengorganisir informasi dalam tabel atau diagram agar lebih mudah dimengerti, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk merumuskan hasil akhir berdasarkan kesimpulan atau verifikasi untuk merumuskan hasil akhir berdasarkan bukti yang telah diperiksa. Analisis hasil penelitian menggunakan metode Triangulasi Teknik, yang berarti memeriksa data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda, seperti mencocokkan hasil wawancara dengan bukti dokumen dan hasil pengamatan, untuk memastikan data tersebut valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lewat wawancara dan pengamatan pada bulan April 2026 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, peneliti mendapatkan pemahaman mengenai cara pengelolaan dan pembuatan laporan dari bendahara.

Proses pengelolaan dan penyusunan laporan dari bendahara di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah mengikuti aturan umum dalam pengelolaan keuangan dengan rapi, selalu mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 142 Tahun 2023 mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. Ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses pengelolaan keuangan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh bendahara untuk menggunakan anggaran, termasuk membuat pembayaran kepada pihak ketiga, mencatat transaksi, menerbitkan dokumen yang diperlukan, dan laporan. Dalam hal ini, pengelolaan dibagi menjadi dua cara yaitu mekanisme LS (Langsung) yang digunakan untuk pembayaran gaji dan pembelian barang/jasa dari pihak lain, serta mekanisme UP/GU (Uang Persediaan/Ganti Uang) yang digunakan untuk pengeluaran operasional harian. Semua transaksi dilakukan tanpa uang tunai dan datanya dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD, tetapi bendahara juga mencatat secara manual untuk menjaga kontrol internal. Selain

itu, proses pengelolaan keuangan juga sudah melewati tahap pemeriksaan administratif sebagai bentuk pengendalian internal.

Proses penatausahaan keuangan merupakan suatu rangkaian mekanisme penggunaan anggaran oleh bendahara yang meliputi pembayaran kepada pihak ketiga, pencatatan, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, hingga pelaporan. Dalam hal ini proses penatausahaan dibagi menjadi dua jalur yaitu mekanisme LS (Langsung) yang dilakukan untuk pembayaran gaji dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, serta mekanisme UP/GU (Uang Persediaan/Ganti Uang) dilakukan untuk operasional kantor sehari-hari. Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai dan dilakukan entry data di aplikasi SIPD, akan tetapi bendahara juga tetap melakukan pencatatan manual sebagai alat kendali internal (*check and balance*). Di dalam proses penatausahaan juga telah melewati tahap verifikasi administrasi keuangan sebagai bentuk pengendalian internal.

Dengan pelaksanaan proses penatausahaan yang baik dan tertib, serta penyusunan laporan yang tepat waktu berdampak pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun terutama dari aspek keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi anggaran belanja sebesar 93,40% pada tahun anggaran 2024 dan 95,40% pada tahun anggaran 2025. Bisa diketahui bahwa terjadi peningkatan sebanyak 2%.

Akan tetapi juga ditemukan adanya berbagai kendala yang tentu saja akan berdampak pada kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan apabila tidak ditangani dengan baik. Kendala tersebut antara lain infrastruktur jaringan yang kurang stabil, keterlambatan pemenuhan administrasi dari pihak ketiga sehingga akan memperlambat proses administrasi keuangan, adanya perubahan regulasi dan terjadinya kesalahan kode rekening belanja yang mengakibatkan proses pencairan tertunda dan harus menunggu proses pengajuan pergeseran anggaran belanja.

Untuk mengatasi permasalahan / kendala adalah dengan memperbaiki jaringan infrastruktur dan menggunakan SIPD di luar waktu sibuk. Selain itu juga perlu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan internal, baik dalam rencana anggaran maupun dalam administrasi keuangan, agar di masa yang akan datang kendala tersebut bisa dihindari.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa poin utama dalam proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Adanya pemisahan tugas dan fungsi pada masing-masing pejabat penatausahaan keuangan penting untuk mencegah terjadinya *human error* maupun penyalahgunaan

wewenang. Peneliti juga menemukan bahwa verifikasi berjenjang (dari PPTK ke PPK-SKPD sebelum ke Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas) telah berjalan efektif, memastikan bahwa setiap proses pembayaran transaksi belanja yang dilakukan memiliki dasar hukum dan bukti yang valid.

Peneliti juga mencatat bahwa penggunaan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) menjadi bagian utama dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Transparansi penggunaan anggaran pun meningkat karena setiap transaksi tercatat secara sistematis, dimana selain melakukan *entry data* di SIPD atas semua transaksi belanja, bendahara pengeluaran juga masih melakukan pencatatan manual sebagai alat kendali internal (cek saldo riil), yang merupakan praktik baik (*best practice*) dalam meminimalisir selisih kas.

Penggunaan SIPD di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah mengubah pola kerja dari manual menjadi berbasis elektronik. Wewenang bendahara dalam menerima bukti transaksi elektronik dari Bank menunjukkan bahwa dinas telah beradaptasi dengan sistem *Cash Management System* (CMS) atau transaksi non-tunai yang telah dilakukan secara konsisten 100% sejak tahun 2020. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan meningkatkan akurasi data transaksi.

Salah satu indikator keberhasilan penatausahaan keuangan suatu organisasi adalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Kedisiplinan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara menunjukkan kepatuhan tinggi dengan menyerahkan laporan administratif dan fungsional sebelum tanggal 10 setiap bulannya, serta taat pajak melalui aplikasi Coretax sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan tahunan secara rutin diselesaikan maksimal bulan Maret untuk mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, bisa dilihat juga dengan adanya peningkatan presentase realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025 sebanyak 2%, dengan rincian realisasi tahun 2024 sebesar 93,40% dan tahun 2025 sebesar 95,40%. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan cara perbaikan infrastruktur jaringan dan mengakses SIPD diluar jam-jam sibuk, peningkatan pengawasan dan pengendalian internal baik dari segi perencanaan anggaran maupun dalam hal administrasi keuangan sehingga di masa yang akan datang bisa meminimalisir kemungkinan adanya permasalahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dan pembahasan mengenai proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mengarahkan pada kesimpulan bahwa proses penatausahaan keuangan

telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ada, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala infrastruktur jaringan yang kurang stabil, keterlambatan kelengkapan administrasi serta adanya perubahan regulasi dan terjadinya kesalahan kode rekening belanja. Penyusunan laporan pertanggungjawaban juga telah dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penatausahaan dan pelaporan keuangan berbasis digital yaitu penggunaan SIPD sebagai platform digital serta proses pembayaran yang dilakukan secara non tunai.

Untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan pelaporan keuangan di masa yang akan datang, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi strategis antara lain optimalisasi infrastruktur jaringan, lebih meningkatkan koordinasi mulai perencanaan anggaran dan administrasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis/pelatihan, serta selalu melakukan penyesuaian apabila ada perubahan regulasi terutama terkait keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M. (2019). *Dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan*. Kencana.
- Bupati Madiun. (2021). *Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun*. Madiun.
- Bupati Madiun. (2023). *Peraturan Bupati Madiun Nomor 142 Tahun 2023 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah*. Madiun.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. (2024). *Catatan atas laporan keuangan TA 2024*. Madiun.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. (2025). *Catatan atas laporan keuangan TA 2025*. Madiun.
- Hermelinda, T. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia teknologi informasi dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Unihaz – JAZ*, Desember 2018.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta.
- Kusmayadi, D. (2012). Pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah dalam mewujudkan good government governance: Survey pada pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), Juli–Desember 2012.
- Listiani, T. (2011). Manajemen kinerja, kinerja organisasi serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan organisasi sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, III(3), Desember 2011.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta.
- Rojabi, M. A. (2025). *Sistem informasi manajemen*. Afdan Rojabi Publisher.

- Terry, G. R., & Fatmawati, B. S. (2019). *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.
- Thian, A. (2022). *Analisis laporan keuangan*. Andi.
- Wahyu, W. D., & Yani, A. (2023). *Manajemen keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Wijoyo, H., Ariyanto, A., Sudarsono, A., & Wijayanti, K. D. (2021). *Sistem informasi manajemen*. Insan Cendekia Mandiri.